



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

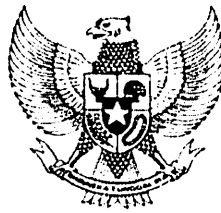
2025

PENETAPAN

P-RENJA

BPKAD KOTA SAMARINDA





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA)

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV Penutup.

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;

- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - ab. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - ac. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - ad. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ae. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - af. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - ag. Kecamatan Palaran;
 - ah. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ai. Kecamatan Samarinda Kota;
 - aj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ak. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - al. Kecamatan Samarinda Utara;
 - am. Kecamatan Sambutan; dan
 - an. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

Telp.(0541)733926 Fax.(0541)733986

S A M A R I N D A

Kode Pos. 75121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 800/2484/300.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Renja perlu dibentuk Tim penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repblik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021/);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
27. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan 2026 capaian Renstra SKPD;
2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD;
5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh dari hasil Musrenbang tahun 2025;

6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

KETIGA : Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 September 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



IBROHIM, SE, M.Si

19650502 198902 1 004

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. BAPPEDALITBANG Kota Samarinda;

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala BPKAD	Ketua
2	Sekretaris BPKAD	Sekretaris
3	Kabid. Anggaran	Anggota
4	Kabid. Perbendahraan	Anggota
5	Kabid. Akuntansi	Anggota
6	Kabid. Aset	Anggota
7	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli	Anggota
12	Penilaian Pemerintah Ahli Muda	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah AWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

P-Renja 2025 merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat penyesuaian kebijakan dan program/kegiatan dalam sisa tahun anggaran berjalan. P-Renja 2025 juga memuat review evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan III tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Samarinda, 10 Oktober 2025
Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda



H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.
NIP 196812091988031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.3 Sistematika Penulisan	2
BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	4
2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	4
2.2 Evaluasi Kinerja Program	4
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun.....	5
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SAMARINDA 27	
BAB 4 PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam mencapai target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sisa tahun berjalan (Juli – Desember 2025). P-Renja ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir program dan kegiatan yang memerlukan pergeseran belanja dan biaya tambahan dalam pemenuhan target capaian kinerja tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yaitu sebagai acuan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan P-RKPD 2025 dan Rancangan Renstra 2025-2029. Penyusunan Perubahan Renja 2025 juga merupakan alat sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renja 2025 dengan Renstra BPKAD Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0398/300.01 tanggal 16 April 2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan sistematika penulisan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta dukungan Prioritas Provinsi dan Nasional.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 juga dilakukan karena adanya perubahan kerangka ekonomi daerah sebagaimana Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 900/0848/012.02 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2025. Dalam rangka menindaklanjuti Amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara demi mencapai program-program prioritas, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana yang lebih fokus pada program yang memberikan dampak langsung dan produktif bagi rakyat. Kebijakan ini mengarahkan pemerintah untuk mengurangi pemborosan, memprioritaskan belanja yang bersifat esensial, dan mengalihkan dana yang dihemat untuk program-program unggulan seperti makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.7.2.4/0398/300.01 tanggal 16 April 2025. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

2.2 Evaluasi Kinerja Program

2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD s.d. Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 adalah Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja berupa Opini Laporan Keuangan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pada Triwulan III Tahun 2025, BPKAD Kota Samarinda telah berhasil memperoleh Opini WTP atas hasil penilaian Laporan Keuangan Tahun 2024. Dengan demikian, capaian sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 telah terpenuhi secara optimal dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

2.2 Evaluasi Kinerja Program

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dalam rangka pencapaian sasaran strategis Tahun 2025 melaksanakan tiga program utama, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ketiga program tersebut memiliki target kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025.

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Nilai 81	Nilai 95	117%

Program Pengelolaan Keuangan dengan indikator Laporan Keuangan pada tahun 2025 memiliki target 1 Laporan. Adapun capaian pada Triwulan III tahun 2025 yaitu 100% dengan capaian 1 Laporan yang merupakan Laporan Keuangan tahun 2024.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah pada Tahun 2025 memiliki target 1 Dokumen. Target tersebut telah tercapai sepenuhnya dengan capaian 100%, melalui penyusunan 1 Dokumen Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah Tahun 2024.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki target nilai sebesar 81 pada Tahun 2025. Capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi nilai yang dicapai adalah 95, sehingga capaian program ini mencapai 117% dan melampaui target yang telah ditetapkan.

2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang telah diperoleh hingga Triwulan III Tahun 2025, serta untuk mengukur kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Evaluasi ini juga memuat gambaran mengenai perkembangan kinerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi kinerja BPKAD Kota Samarinda pada Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana hasil yang diperoleh melalui aplikasi eDalev, dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Triwulan III 2025

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				1	1	2	2	3	3						
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda															
KEUANGAN			215,109,732,096		39,485,516,044		65,813,923,496		26,279,785,019		131,579,224,559		131,579,224,559	40.38	61.17
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			47,000,349,917		1,410,909,111		3,384,212,072		1,208,826,223		6,003,947,406		6,003,947,406	30.76	12.77
	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan		1		0		0		1				100	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2,579,576,269		393,237,000		419,982,525		401,578,540		1,214,798,065		1,214,798,065	10	47.09
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen (Murni dan Perubahan)		0		0		0		0				0	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			203,406,000		34,458,000		41,525,525		35,700,000		111,683,525		111,683,525	0	54.91
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			195,349,400		7,580,000		18,680,000		4,890,000		31,150,000		31,150,000	0	15.95
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			202,653,750		12,080,000		55,855,000		98,899,500		166,834,500		166,834,500	0	82.32
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			113,027,400		7,460,000		3,730,000		0		11,190,000		11,190,000	0	9.9
	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		0		0		0		0				0	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			149,800,000		24,687,500		12,301,000		0		36,988,500		36,988,500	0	24.69
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			103,446,500		4,270,000		0		0		4,270,000		4,270,000	0	4.13
	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			284,208,400		112,718,000		86,135,000		0		198,853,000		198,853,000	0	69.97
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			236,637,500		7,580,000		34,510,000		106,743,000		148,833,000		148,833,000	0	62.89
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			555,330,719		88,680,000		67,630,000		66,660,000		222,970,000		222,970,000	100	40.15
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1		0		0		1				100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			535,716,600		93,723,500		99,616,000		88,686,040		282,025,540		282,025,540	0	52.64
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		0		0		0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)														10	47.09
Predikat Kinerja														SR	SR
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			2,028,397,949		637,036,311		421,359,295		320,528,800		1,378,924,406		1,378,924,406	54.55	67.98
	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku		5		0		0		5				100	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			5,062,000		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			5,070,000		0		0		0		0		0	100	0
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		1		0		0		1				100	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			282,017,359		37,526,300		99,410,000		37,500,000		174,436,300		174,436,300	100	61.85
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		1		0		0		1				100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Penatausahaan Pembiayaan Daerah			5,080,500		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			164,140,630		52,557,000		14,230,000		28,504,800		95,291,800		95,291,800	100	58.05
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		1		0		0		1				100	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			509,323,500		132,437,490		170,310,000		68,380,000		371,127,490		371,127,490	100	72.87
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		1		0		0		1				100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			54,636,350		33,488,000		3,190,000		13,200,000		49,878,000		49,878,000	0	91.29
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		0		0		0		0				0	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			5,024,800		0		0		0		0		0	100	0

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3								
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1	0	0		1						100	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			232,356,435		47,187,600		69,630,000		72,840,000		189,657,600		189,657,600	0	81.62
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		0	0	0		0						0	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			469,153,375		165,705,921		8,429,295		50,580,000		224,715,216		224,715,216	100	47.9
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1	0	0		1						100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			296,533,000		168,134,000		56,160,000		49,524,000		273,818,000		273,818,000	0	92.34
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		0		0		0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)														54.55	67.98
Predikat Kinerja														R	S
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1,664,480,433		273,578,050		457,904,677		301,758,258		1,033,240,985		1,033,240,985	39.24	62.08
	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis buku Lap. Keuangan		0		0		0		0				0	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			325,086,283		43,840,000		118,670,000		47,080,000		209,590,000		209,590,000	36.11	64.47
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan		9		4		0		13				36.11	
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			151,909,050		50,183,000		25,890,000		22,074,100		98,147,100		98,147,100	100	64.61

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3								
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		1		0		0		1				100	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			105,272,700		21,582,000		29,463,000		26,428,000		77,473,000		77,473,000	44.44	73.59
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		4		4		0		8				44.44	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			337,090,800		60,670,000		82,841,750		111,947,500		255,459,250		255,459,250	33.33	75.78
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan		0		3		0		3				33.33	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			109,272,700		22,510,000		39,421,400		29,562,500		91,493,900		91,493,900	0	83.73
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			198,940,000		6,120,000		77,264,527		19,546,158		102,930,685		102,930,685	100	51.74

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1		0		0		1				100	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			246,363,500		35,050,000		79,204,000		38,210,000		152,464,000		152,464,000	0	61.89
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		0		0		0		0				0	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			190,545,400		33,623,050		5,150,000		6,910,000		45,683,050		45,683,050	0	23.97
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 Lembaga		0		0		0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)														39.24	62.08
Predikat Kinerja														SR	R
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40,000,000,000		0		1,945,407,225		0		1,945,407,225		1,945,407,225	0	4.86
	Jumlah Belanja Keadaan darurat termasuk keperluan Mendesak yang dipenuhi	1 Paket		0		0		0		0				0	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			40,000,000,000		0		1,945,407,225		0		1,945,407,225		1,945,407,225	0	4.86
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		0		0		0		0				0	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				1	1	2	2	3	3						
Rata-rata capaian kinerja (%)														0	4.86
Predikat Kinerja														SR	SR
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		727,895,266		107,057,750		139,558,350		184,960,625		431,576,725		431,576,725	50	59.29	
	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	3 jenis laporan		0		0		0		0			0		
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		355,722,633		66,071,750		35,580,000		124,330,625		225,982,375		225,982,375	100	63.53	
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1		0		0		1			100		
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		372,172,633		40,986,000		103,978,350		60,630,000		205,594,350		205,594,350	0	55.24	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		0		0		0		0			0		
Rata-rata capaian kinerja (%)														50	59.29
Predikat Kinerja														SR	R
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)														30.76	12.77

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		K	Rp	1	1	2	2	3	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Predikat Kinerja														SR	SR
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			102,957,738,171		14,856,553,133		44,693,318,852		13,571,115,214		73,120,987,199		73,120,987,199	30.77	71.02
	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1		0		0		1				100	
Pengelolaan Barang Milik Daerah			102,957,738,171		14,856,553,133		44,693,318,852		13,571,115,214		73,120,987,199		73,120,987,199	30.77	71.02
	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1		0		0		1				100	
Penyusunan Standar Harga			5,000,000		0		0		0		0		0	100	0
	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		0		1		0		1				100	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			5,000,000		0		0		0		0		0	100	0
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0		0		1		1				100	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			15,039,365,000		7,989,137,000		3,002,123,819		2,448,034,253		13,439,295,072		13,439,295,072	200	89.36
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1		0		1		2				200	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			5,000,000		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0				0	
Penatausahaan Barang Milik Daerah			11,469,330,000		427,395,000		8,090,281,931		3,023,709,256		11,541,386,187		11,541,386,187	0	100.63
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0		0				0	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Inventarisasi Barang Milik Daerah			666,400,000		42,375,000		218,600,000		216,491,991		477,466,991		477,466,991	0	71.65
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0		0				0	
Pengamanan Barang Milik Daerah			73,018,865,000		5,980,703,100		33,020,814,104		7,461,951,694		46,463,468,898		46,463,468,898	0	63.63
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0		0				0	
Penilaian Barang Milik Daerah			1,145,142,171		382,189,362		171,654,218		146,461,000		700,304,580		700,304,580	0	61.15
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0		0				0	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			5,000,000		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0		0				0	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			419,706,000		22,953,671		15,580,000		41,806,640		80,340,311		80,340,311	0	19.14
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0		0		0		0				0	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			5,000,000		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0		0		0		0				0	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			486,000,000		11,800,000		166,850,000		102,116,005		280,766,005		280,766,005	0	57.77
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		0		0		0		0				0	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			687,930,000		0		7,414,780		130,544,375		137,959,155		137,959,155	0	20.05
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang		0		0		0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)														30.77	71.02
Predikat Kinerja														SR	S
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)														30.77	71.02
Predikat Kinerja														SR	S
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			65,151,644,008		23,218,053,800		17,736,392,572		11,499,843,582		52,454,289,954		52,454,289,954	59.6	80.51
	Nilai IKM	81 Nilai		95		0		0		95				117.28	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			355,000,000		84,831,500		141,605,500		41,461,000		267,898,000		267,898,000	128.33	75.46
	Nilai AKIP	80		0		71		0		71				88.75	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			200,000,000		48,661,000		54,619,000		21,491,000		124,771,000		124,771,000	60	62.39
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		3		0		0		3				60	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			85,000,000		19,906,000		45,248,000		11,536,000		76,690,000		76,690,000	200	90.22
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1		0		1		2				200	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,000,000		16,264,500		41,738,500		8,434,000		66,437,000		66,437,000	125	94.91
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2		2		1		5				125	
Rata-rata capaian kinerja (%)														128.33	75.46
Predikat Kinerja														ST	S
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36,700,130,928		11,308,698,892		8,744,584,072		8,799,824,782		28,853,107,746		28,853,107,746	55.17	78.62
	Jumlah Laporan	7 Laporan		7		0		0		7				100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34,561,837,049		10,702,418,011		8,444,381,659		8,799,824,782		27,946,624,452		27,946,624,452	1.23	80.86

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3								
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		81		81		1		1				1.23	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2,028,293,879		600,085,881		270,321,513		0		870,407,394		870,407,394	50	42.91
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen		13		13		0		26				50	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			110,000,000		6,195,000		29,880,900		0		36,075,900		36,075,900	114.29	32.8
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan		7		0		1		8				114.29	
Rata-rata capaian kinerja (%)														55.17	78.62
Predikat Kinerja														R	T
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			255,591,160		0		0		0		0		0	3.75	0
	Jumlah Pegawai	131 Orang		0		0		0		0				0	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			55,591,160		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	131 Paket		0		0		0		0				0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			200,000,000		0		0		0		0		0	7.5	0

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	40 Orang		3		0		0		3				7.5	
Rata-rata capaian kinerja (%)														3.75	0
Predikat Kinerja														SR	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah			10,948,542,579		6,868,308,800		5,179,791,700		597,107,600		12,645,208,100		12,645,208,100	52.08	115.5
	Jumlah Laporan	7 Laporan		7		0		0		7				100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			700,000,000		177,921,600		243,885,000		76,388,200		498,194,800		498,194,800	50	71.17
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		3		3		0		6				50	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7,000,000,000		5,857,458,000		4,141,698,200		410,271,700		10,409,427,900		10,409,427,900	50	148.71
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		3		3		0		6				50	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			163,909,050		49,925,000		74,963,500		38,982,700		163,871,200		163,871,200	56.67	99.98
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket		8		9		0		17				56.67	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			600,000,000		110,200,000		98,750,000		0		208,950,000		208,950,000	60	34.83
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		2		1		0		3				60	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1,500,000,000		605,464,200		516,145,000		51,190,000		1,172,799,200		1,172,799,200	50	78.19

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3								
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1		1		0		2				50	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			66,088,129		0		0		0		0		0	50	0
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800 Dokumen		0		2400		0		2400				50	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			218,545,400		50,000,000		104,350,000		20,275,000		174,625,000		174,625,000	60	79.9
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		4		2		0		6				60	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			700,000,000		17,340,000		0		0		17,340,000		17,340,000	40	2.48
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		15		5		0		20				40	
Rata-rata capaian kinerja (%)														52.08	115.5
Predikat Kinerja														R	ST
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,027,000,000		1,484,730,000		0		0		1,484,730,000		1,484,730,000	60	73.25
	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan		1		1		0		2				66.67	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			318,000,000		303,040,000		0		0		303,040,000		303,040,000	100	95.3
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1		0		0		1				100	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			309,000,000		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0		0		0		0				0	
Pengadaan Mebel			1,400,000,000		1,181,690,000		0		0		1,181,690,000		1,181,690,000	80	84.41
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit		60		0		0		60				80	
Rata-rata capaian kinerja (%)														60	73.25
Predikat Kinerja														R	S
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,551,452,521		1,181,634,888		556,050,500		214,900,000		1,952,585,388		1,952,585,388	67.09	42.9
	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan		1		0		0		1				100	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5,463,635		0		0		0		0		0	66.67	0
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		20		0		0		20				66.67	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1,341,175,800		395,839,588		0		0		395,839,588		395,839,588	75	29.51
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		9		9		9		27				75	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			139,268,436		10,300,000		0		0		10,300,000		10,300,000	66.67	7.4
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan		20		0		0		20				66.67	

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3,065,544,650		775,495,300		556,050,500		214,900,000		1,546,445,800		1,546,445,800	60	50.45
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		2		0		1		3				60	
Rata-rata capaian kinerja (%)														67.09	42.9
Predikat Kinerja														S	SR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,313,926,820		2,289,849,720		3,114,360,800		1,846,550,200		7,250,760,720		7,250,760,720	50.76	70.3
	Laporan Pemeliharaan	159 Unit		159		0		0		159				100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			655,636,200		143,517,600		325,505,730		27,997,000		497,020,330		497,020,330	80.3	75.81
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit		20		20		13		53				80.3	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1,046,363,500		121,943,500		284,446,740		0		406,390,240		406,390,240	75.76	38.84
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit		20		10		20		50				75.76	
Pemeliharaan Mebel			32,781,810		0		0		0		0		0	0	0

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3	3	3						
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit		0		0		0		0				0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			960,099,985		278,412,900		550,411,480		86,789,500		915,613,880		915,613,880	50	95.37
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		1		0		0		1				50	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			73,181,750		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0		0		0		0				0	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3,500,000,000		1,007,657,620		1,441,284,750		753,021,500		3,201,963,870		3,201,963,870	100	91.48
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1		0		0		1				100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4,000,000,000		738,318,100		512,712,100		978,742,200		2,229,772,400		2,229,772,400	100	55.74
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1		0		0		1				100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45,863,575		0		0		0		0		0	0	0
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0		0		0				0	
Rata-rata capaian kinerja (%)														50.76	70.3

Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		TW 1		TW 2		TW 3		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1	1	2	2	3	3								
Predikat Kinerja														SR	S
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 1)														59.6	80.51
Predikat Kinerja														R	T

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian kinerja Renja BPKAD yang telah dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Pada Program Pengelolaan Keuangan terdiri atas 5 kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah memperoleh Predikat Sangat Rendah (SR) dengan capaian kinerja 10%.
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah memperoleh Predikat Rendah (R) dengan capaian kinerja 54,55%.
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memperoleh Predikat Sangat Rendah (SR) dengan capaian kinerja 39,24%.
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh Predikat Sangat Rendah (SR) dengan capaian kinerja 0%.
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah memperoleh Predikat Sangat Rendah (R) dengan capaian kinerja 50%.

Berdasarkan akumulasi kegiatan, Program Pengelolaan Keuangan memperoleh predikat Sangat Rendah (SR) dengan capaian kinerja 30,76%. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar subkegiatan baru akan direalisasi pada Triwulan IV Tahun 2025.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memperoleh Predikat Sangat Rendah (SR) dengan capaian kinerja 30,77%. Sehingga, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memperoleh Predikat Sangat Rendah (S) dengan capaian kinerja 30,77%. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar subkegiatan baru akan direalisasi pada Triwulan IV Tahun 2025.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memperoleh Predikat Sangat Tinggi (ST) dengan capaian kinerja 128,33%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh Predikat Rendah (R) dengan capaian kinerja 55,17%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memperoleh Predikat Sangat Rendah (R) dengan capaian kinerja 3,75%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh Predikat Rendah (R) dengan capaian kinerja 52,08%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memperoleh Predikat Rendah (R) dengan capaian kinerja 60%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh Predikat Sedang (S) dengan capaian kinerja 67,09%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh Predikat Sangat Rendah (SR) dengan capaian kinerja 50,76%.

Berdasarkan akumulasi kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh predikat Sedang (S) dengan capaian kinerja 59,6%. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar subkegiatan baru akan direalisasi pada Triwulan IV Tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini diselaraskan dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mendukung prioritas pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional.

Perubahan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda. Visi dan Misi Kota Samarinda sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD Kota Samarinda yaitu:

VISI

SAMARINDA MAJU untuk KALTIM MAJU

-Mandiri, Adil, ber-Jaya, Unggul-

MISI

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.

Dalam mendukung Visi dan Misi Kota Samarinda yang telah disebutkan diatas BPKAD Kota Samarinda terfokus pada **Misi 5** yaitu : **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel”**.

Adapun rincian Perubahan Renja Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SAMARINDA TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA								180.019.031.049,00	215.109.732.096,00	192.034.708.181,00	12.015.677.132,00							113.982.502.544,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							180.019.031.049,00	215.109.732.096,00	192.034.708.181,00	12.015.677.132,00							113.982.502.544,00		
	5.02	KEUANGAN							180.019.031.049,00	215.109.732.096,00	192.034.708.181,00	12.015.677.132,00							113.982.502.544,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81 Nilai	75,00 92,00 Nilai Indeks	46.195.118.626,00	65.151.644.008,00	68.080.823.626,00	27.052.856.669,00							73.247.975.295,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				80	100,00 %	325.000.000,00	355.000.000,00	340.812.000,00	15.812.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	192.700.000,00	-7.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	85.000.000,00	81.490.000,00	6.490.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	70.000.000,00	66.622.000,00	16.622.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				7 Laporan	100,00 %	38.394.491.326,00	36.700.130.928,00	36.479.145.259,00	-1.915.346.067,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		62.353.188.075,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/b ulan	84 Orang/b ulan	35.287.995.755,00	34.561.837.049,00	34.343.359.380,00	-944.636.375,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.214.721.335,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52 Dokumen	52 Dokumen	3.056.495.571,00	2.028.293.879,00	2.028.293.879,00	-1.028.201.692,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.082.191.299,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	110.000.000,00	107.492.000,00	57.492.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				131 Orang	100,00 %	255.591.160,00	255.591.160,00	105.591.160,00	-150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		257.258.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				131 Paket	1 Paket	55.591.160,00	55.591.160,00	55.591.160,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			57.258.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	44 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				7 Laporan	100,00 %	1.685.978.509,00	10.948.542.579,00	14.248.542.579,00	12.562.564.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.251.557.865,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	364.908.900,00	700.000.000,00	700.000.000,00	335.091.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			787.856.167,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	245.863.575,00	7.000.000.000,00	10.500.000.000,00	10.254.136.425,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			253.239.482,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	12 Paket	163.909.050,00	163.909.050,00	163.909.050,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	12 Paket	118.545.400,00	600.000.000,00	600.000.000,00	481.454.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	12 Paket	163.909.050,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.336.090.950,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4800 Dokumen	12 Dokumen	66.088.129,00	66.088.129,00	66.088.129,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			68.070.773,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	12 Laporan	218.545.400,00	218.545.400,00	218.545.400,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	12 Laporan	344.209.005,00	700.000.000,00	500.000.000,00	155.790.995,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			354.535.275,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				3 Laporan	100,00 %	727.000.000,00	2.027.000.000,00	1.741.353.287,00	1.014.353.287,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		1.007.970.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	318.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			349.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	10 Unit	309.000.000,00	309.000.000,00	23.353.287,00	-285.646.713,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			339.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	100.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			318.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				1 Laporan	100,00 %	2.155.040.161,00	4.551.452.521,00	4.851.452.521,00	2.696.412.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		4.305.071.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	12 Laporan	5.463.635,00	5.463.635,00	5.463.635,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.627.544,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12 Laporan	786.763.440,00	1.341.175.800,00	1.341.175.800,00	554.412.360,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			810.366.343,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Laporan	12 Laporan	139.268.436,00	139.268.436,00	139.268.436,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	12 Laporan	1.223.544.650,00	3.065.544.650,00	3.365.544.650,00	2.142.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.320.250.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				159 Unit	100,00 %	2.652.017.470,00	10.313.926.820,00	10.313.926.820,00	7.661.909.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.962.929.261,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				66 Unit	72 Unit	655.636.200,00	655.636.200,00	655.636.200,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			675.305.286,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	72 Unit	546.363.500,00	1.046.363.500,00	1.046.363.500,00	500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			573.681.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	32.781.810,00	32.781.810,00	32.781.810,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			34.420.901,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	60.099.985,00	960.099.985,00	960.099.985,00	900.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.104.984,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	273.181.750,00	73.181.750,00	73.181.750,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			273.181.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	382.454.450,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.117.545.550,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			401.577.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	455.636.200,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.544.363.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			688.418.010,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	245.863.575,00	45.863.575,00	45.863.575,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			253.239.482,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1 Laporan	100,00 20,14 50,56 60,50 96,10 % % % %	56.466.174.252,00	47.000.349.917,00	31.000.821.762,00	-18.743.680.747,00							37.722.493.505,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2.406.839.680,00	2.579.576.269,00	2.278.736.789,00	-128.102.891,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.408.378.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	268.545.400,00	203.406.000,00	200.990.000,00	-67.555.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	268.545.400,00	195.349.400,00	192.379.400,00	-76.166.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	223.181.750,00	202.653.750,00	186.426.850,00	-36.754.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	223.181.750,00	113.027.400,00	110.502.900,00	-112.678.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	294.209.005,00	149.800.000,00	149.800.000,00	-144.409.005,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			99.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	223.181.750,00	103.446.500,00	103.446.500,00	-119.735.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.446.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	254.988.400,00	284.208.400,00	239.708.400,00	-15.280.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		520.138.052,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	317.687.156,00	236.637.500,00	189.512.500,00	-128.174.656,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -		481.717.771,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	2 Dokumen	228.682.719,00	555.330.719,00	467.393.789,00	238.711.070,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		184.043.201,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	40 Orang	104.636.350,00	535.716.600,00	438.576.450,00	333.940.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD				5 Jenis Buku	5 Jenis Buku	1.675.612.538,00	2.028.397.949,00	1.709.259.959,00	33.647.421,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah	2.446.880.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	163.909.050,00	5.062.000,00	5.062.000,00	-158.847.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	4 Laporan	109.272.700,00	5.070.000,00	5.070.000,00	-104.202.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	4 Dokumen	282.017.359,00	282.017.359,00	247.838.500,00	-34.178.859,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		393.477.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54.636.350,00	5.080.500,00	5.080.500,00	-49.555.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	4 Dokumen	184.585.630,00	164.140.630,00	140.751.000,00	-43.834.630,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		190.123.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	4 Dokumen	220.699.895,00	509.323.500,00	422.503.078,00	201.803.183,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima		433.320.892,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	4 Laporan	54.636.350,00	54.636.350,00	50.236.350,00	-4.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	4 Dokumen	54.636.350,00	5.024.800,00	5.024.800,00	-49.611.550,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	12 Dokumen	242.554.435,00	232.356.435,00	211.361.435,00	-31.193.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			455.831.068,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	254.028.069,00	469.153.375,00	332.068.296,00	78.040.227,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			467.648.911,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	40 Orang	54.636.350,00	296.533.000,00	284.264.000,00	229.627.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD				3 Jenis buku Lap.K euangan	3 Jenis buku Lap.K euangan	1.624.276.768,00	1.664.480.433,00	1.396.228.008,00	-228.048.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.085.005.071,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				36 Laporan	4 Laporan	325.086.283,00	325.086.283,00	277.086.283,00	-48.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			334.838.871,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	12 Dokumen	163.909.050,00	151.909.050,00	123.909.050,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	12 Laporan	109.272.700,00	105.272.700,00	93.207.775,00	-16.064.925,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				9 Laporan	40 Laporan	337.090.800,00	337.090.800,00	296.028.300,00	-41.062.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			450.203.524,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	109.272.700,00	109.272.700,00	109.272.700,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	114.736.335,00	198.940.000,00	153.565.000,00	38.828.665,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			118.178.425,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				150 Orang	200 Orang	246.363.500,00	246.363.500,00	208.613.500,00	-37.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			562.754.405,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>				12 Lembaga	21 Lembaga	218.545.400,00	190.545.400,00	134.545.400,00	-84.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Penyaluran Belanja Transfer Belanja Daerah</i>				1 Paket	100,00 %	50.000.000.000,00	40.000.000.000,00	24.965.000.000,00	-25.035.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		30.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000.000,00	40.000.000.000,00	24.965.000.000,00	-25.035.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah</i>				3 jenis laporan	2 Kegiatan	759.445.266,00	727.895.266,00	651.597.006,00	-107.848.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		782.228.622,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	379.722.633,00	355.722.633,00	329.457.569,00	-50.265.064,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			391.114.311,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				150 Orang	200 Orang	379.722.633,00	372.172.633,00	322.139.437,00	-57.583.196,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			391.114.311,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap				1 Dokumen	14,15 %	77.357.738.171,00	102.957.738.171,00	92.953.062.793,00	-74.345.704.427,00							3.012.033.744,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	77.357.738.171,00	102.957.738.171,00	92.953.062.793,00	15.595.324.622,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		3.012.033.744,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	109.272.700,00	5.000.000,00	0,00	-109.272.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.505.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	54.636.350,00	5.000.000,00	0,00	-54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	163.909.050,00	15.039.365.000,00	15.026.365.000,00	14.862.455.950,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	54.636.350,00	5.000.000,00	0,00	-54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	40.735.897.200,00	11.469.330.000,00	14.896.944.450,00	-25.838.952.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			675.305.286,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	54.636.350,00	666.400.000,00	600.025.000,00	545.388.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	35.099.483.641,00	73.018.865.000,00	60.221.100.172,00	25.121.616.531,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			562.754.405,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	127.818.100,00	1.145.142.171,00	905.342.171,00	777.524.071,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	163.909.050,00	5.000.000,00	0,00	-163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	327.818.100,00	419.706.000,00	369.656.000,00	41.837.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	245.067.900,00	5.000.000,00	0,00	-245.067.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			252.419.937,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				1 Laporan	1 Laporan	54.636.350,00	486.000.000,00	437.550.000,00	382.913.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	1 Orang	166.017.030,00	687.930.000,00	496.080.000,00	330.062.970,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			170.997.541,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
		J U M L A H							180.019.031.049,00		215.109.732.096,00		192.034.708.181,00		814.903.879.571,00				113.982.502.544,00		

Dengan memperhatikan Asta Cita serta Visi dan Misi RPJMD Kota Samarinda, program dan kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Samarinda memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional dan daerah. Yaitu Asta Cita ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi dan penyelundupan.” Dan Misi ke-5 RPJMD Kota Samarinda yaitu “Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.”

Adapun Keterkaitan Program Prioritas BPKAD Kota Samarinda dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2025, terdapat pada tabel dibawah ini:

No	Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Urusan
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi	80	84	
4.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah			Indeks Integritas Pemerintah	74,50	78,58	
		1. Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	20,14	24,18	Keuangan
		2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemkot		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	60,50	64,75	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96,10	97,50	
				Persentase Penurunan SILPA	50,56	8,48	
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	14,15	26,15	

Berdasarkan tabel di atas yaitu mengenai keterkaitan Program Prioritas BPKAD Kota Samarinda dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Maka terjadi perubahan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Program Prioritas BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025, sebagai berikut:

Sebelum		Sesudah	
Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Indikator
Meningkatnya Pelayanan yang akuntabel	Nilai LPPD	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Integritas Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
			Persentase Penurunan SILPA
			Persentase Laporan Keuangan tepat waktu
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah bersifat kumulatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, terdapat penyesuaian indikator program dan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Indikator	
	Sebelum	Sesudah
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik

Perumusan perubahan indikator dan target kinerja pada program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD secara efektif dan efisien. P-Renja ini mencerminkan komitmen kami dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan P-Renja ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Akhir kata, semoga P-Renja BPKAD Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Samarinda. Kami terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan P-Renja ini di masa mendatang.

Terima kasih.